

**JUDUL: UTANG DALAM PERMOHONAN PKPU BERDASARKAN
PUTUSAN PERDATA DAN PUTUSAN PIDANA YANG SALING
BERTENTANGAN**

Nama: Jennifer Andrea
Jurusan/ Program Studi: Hukum/Magister Kenotariatan
Pembimbing: Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau yang disingkat dengan PKPU, merupakan salah satu upaya hukum pelunasan utang yang menitikberatkan baik pihak kreditor dengan memberikan perlindungannya dari itikad buruk dari kreditor lain atau debitornya maupun bagi pihak debitor dengan cara memberikan waktu untuk memusyawarahkan kembali tata cara dan jangka waktu pelunasan utang. Demi melindungi kepentingan kedua belah pihak, permohonan PKPU yang diajukan wajib memenuhi syarat dan unsur yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang selanjutnya disingkat dengan UU Kepailitan. Salah satu contoh permohonan PKPU yang diajukan ke Pengadilan adalah permohonan PKPU yang diajukan oleh pembeli terhadap penjual atas kewajiban yang timbul dari putusan perdata tetapi bertentangan dengan putusan pidana, yang dimana keduanya telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian melalui tesis ini bertujuan untuk menganalisa permohonan PKPU tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai persyaratan dan penerapan konsep pembuktian secara sederhana dalam permohonan PKPU. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kehadiran putusan perdata dan putusan pidana yang saling bertentangan mengakibatkan permohonan PKPU tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Oleh karena itu, permohonan PKPU yang diajukan oleh pembeli tidak memenuhi syarat dan pembuktian secara sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Kepailitan *juncto* Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Pada kesimpulannya, permohonan PKPU tidak dapat dikabulkan.

Kata Kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perikatan, Pembuktian secara Sederhana.

**TITLE : A PETITION OF SUSPENSIONS OF PAYMENT FILED BASED
ON DEBT THAT OCCURS FROM CONFLICTING DECISIONS IN CIVIL
AND CRIMINAL JUDGEMENT**

Name: Jennifer Andrea

Department/ Study Program: Hukum/Magister Kenotariatan

Advisor: Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H.

ABSTRACT

Suspension of payment is one of the legal procedures to ensure debt recovery that provides legal protection for creditors especially from unfair practices by other creditors or debtors and legal protection for debtors by giving an amount of time to renegotiate the terms and conditions regarding debt adjustment. To ensure the protection of both parties, a petition of suspension of payments must fulfill all the requirements instructed by Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, or UU Kepailitan. Out of all practices, a buyer once filed a petition of suspensions of payment towards its seller over a claim that was instructed by a civil judgement yet contradicts a criminal judgement. This research is conducted to evaluate the petition of suspensions of payment filed based on the legal provision that applies for requirements of suspensions of payment and application of simple verification procedure. The study concluded that the existence of two contradicting judgements results the suspensions of payment filed can't pass the simple verification procedure. Therefore, the petition of suspensions of payment filed doesn't meet the requirements instructed by Article 222 juncto Article 8 section 4 UU Kepailitan and is not applicable for the simple verification procedure.

Keyword: Suspension of Payment, Obligations, Simple Verification Procedure.

